

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN
TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI MASA
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021**

(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

VENA SYAHARANI

NPM 218.01.0.9.1066



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2022**

RINGKASAN

Vena Syaharani, NPM 21801091066, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021”. Dosen Pembimbing 1 : DR. H. Slamet Muchsin, M.Si , Dosen Pembimbing 2 : Retno Wulan Sekarsari, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisis pengaruh dari akuntabilitas BKAD Kota Batu terhadap tata kelola keuangan selama pandemic covid 19, pengaruh transparansi keuangan terhadap tata Kelola yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu, pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap tata Kelola keuangan yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu serta faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan anggaran APBD yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan responden berjumlah 38 orang. Untuk data pada penelitian menggunakan data primer dan sekunder dan menggunakan data statistik deskriptif. Data kemudian dikumpulkan sebagai hasil dari kuesioner dan wawancara yang telah dibagikan kepada responden. Metode analisa yang digunakan yakni menggunakan uji normalitas dan uji heterokedastisitas yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya uji hipotesis menunjukkan bahwasanya akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan pada tata kelola keuangan daerah, sedangkan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan pada tata kelola serta akuntabilitas dan transparansi pada tata kelola yang memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan menurut uji heterokedastisitas untuk akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Serta untuk faktor pendorong terletak pada tersedianya regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sudah ada di setiap tingkatannya serta fasilitas berupa aplikasi dari Kemendagri yakni SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang digunakan untuk melaporkan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintahan pusat. Untuk faktor penghambat yakni pada jaringan dan server yang sering terganggu saat mengunggah hasil laporan keuangan daerah.

Dari pemaparan di atas dapat diharapkan untuk kemudian lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta tata kelola di dalam pengelolaan anggaran daerah serta aplikasi SIPD serta server yang berkaitan dapat dibenahi dengan segera agar proses pengunggahan laporan keuangan daerah tidak terganggu.

Kata Kunci :Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola, Covid-19

SUMMARY

Vena Syaharani, NPM 21801091066, *Public Administration of Faculty of The Administrative Science of the University of Islam Malang, "The Influence of Financial Accountability and Transparency on Regional Financial Governance in Covid-19 of the year 2021-*

2022", Guidance Counselor 1 : DR. H. Slamet Muchsin, M.Si , Guidance Counselor 2 : Retno Wulan Sekarsari, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc

This research has the goal of being able to analyze the accountability influence of BKAD Kota Batu against financial governance during covid-19 pandemic, the effect of financial transparency on the governance by BKAD Kota Batu, the influence of accountability and transparency on financial governance by BKAD Kota Batu and the driving and inhibitory factors APBD by BKAD Kota Batu. The sample sampling technique on this study uses a purposive sampling with 38 of the respondents. For data on research using primary and secondary data and using descriptive statistics. The data collected as a result of the questionnaires and interviews which have been distributed to respondents. The method of analysis used was that of using normal tests and heterocality test that were used on hypotheses test.

The research shows that hypothetical tests show that accountability does not significantly affect local financial governance, while transparency does have a significant impact on governance and accountability and transparency on governance that has significant impact. While on heterosticizing test for accountability and transparency on local financial governance. As for incentives are being made by regulations relating to good regional financial management and existing on every level as well as by ministries and state government information systems that are used to report on regional financial management to central governance. For inhibitory factors on networks and servers that are often disrupted when they upload the results of the regional financial reports.

From the above can be expected to the more



improve for accountability, transparency and governance in area budget management and associated SIPD applications and servers can be summarized immediately so that the uploading process of regional reports is not affected.

Keyword : Accountability, Transparency, Governance, Covid-19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tatanan normatif, sesuai dengan pernyataan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kemudian Peraturan Gubernur Tahun 50 Tahun 2020 yang membahas tentang Perubahan Keempat Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, Peraturan Walikota (Perwali) atas Perubahan Kelima Nomor 97 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2021 yang membahas tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah menjadi Undang-Undang telah melahirkan peraturan dan paradigma baru pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang kemudian diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya sistem kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan serta tidak lupaperan serta masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2006) penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal ini telah berdasarkan undang-undang yang menciptakan suasana baru, yakni gesernya kewenangan pemerintah terhadap sistem sentralis birokratis kepa pemerintah dengan sistem desentralik

partisipatoris.

Sebagai bagian dari organisasi pemerintahan/organisasi sektor publik. Dalam hal ini pemerintah daerah diharuskan untuk dapat mempunyai kinerja yang dapat berorientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta mendorong kinerja agar lebih tanggap dan cepat dengan memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat bisa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Kewajiban melayan masyarakat ini menjadi sebuah tuntutan bagi sektor publik untuk dapat mengabdikan kepada negara dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan sebagai bagian dari komponen suksesnya program-program dari organisasi sektor publik.

Dalam tatanan teoritis yang kemudian berhubungan dengan tanggungjawab dari organisasi sektor publik untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat, dalam hal ini sesuai dengan pengertian dari akuntabilitas yang dianggap sebagai salah satu bentuk perwujudan dari prinsip *good governance*. Menurut Dwiyanto (2008:98) mengatakan bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu perwujudan atas besarnya tanggungjawab aparat tentang kebijakan pada proses pelayanan publik yang kemudian dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Tanggung jawab yang dimaksud yakni atas keberhasilan ataupun kegagalan pada pelaksanaan misi dari organisasi pada saat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh alat pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Kemudian akuntabilitas kerja ini akan menjelaskan masing-masing indikator sasaran yang berisikan target dengan implementasinya. Uraian target serta pelaksanaan implementasinya kemudian akan dijelaskan pada hasil evaluasi kerja apakah kinerja para pegawai tersebut mengalami

penurunan ataupun peningkatan.

Adapun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan rencana keuangan dari pemerintah daerah selama periode 1 tahun kerja yang kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah yang dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan publik tentang sistem prioritas pengalokasian dana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah melalui koordinasi langsung dengan lembaga legislatif yang mana dalam hal ini DPRD.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19 ini juga dinilai sebagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan sangat transparan. Dikarenakan pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan seluruh sektor melemah, termasuk ekonomi dan kesehatan. Dalam hal ini dana anggaran dari APBD lebih ditujukan kepada penanganan covid-19 untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat yang ada di daerah dan seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak. Sedangkan dalam tatanan aspek empiris, akuntabilitas juga berlaku pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan perangkat daerah yang ada pada pemerintah daerah yang memiliki fungsi sebagai pusat dari seluruh pertanggungjawaban keuangan daerah.

Adapun fenomena yang tengah terjadi di Kota Batu saat ini yang menjadi akar permasalahan yang diambil oleh penulis pada pembahasan ini yaitu :

1. Pada dasarnya, aspek pengelolaan anggaran dari APBD merupakan salah satu faktor penting yang sangat berhubungan dengan fungsi pengelolaan pembangunan daerah. Namun pengelolaan terhadap serapan anggaran Pemerintah Kota Batu hanya tercatat sebesar 52,43% yang dikhawatirkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2021 akan membesar¹.

Menurut pernyataan dari Kanal Berita Batuhits.com 2021, adapun rincian dari serapan anggaran sebesar 52,43% ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah APBD Kota Batu Tahun 2021 masih terbelanjakan sebesar Rp. 609,4 miliar dari Rp. 1,1 Triliun
- b. Anggaran yang dibelanjakan masih kurang Rp. 400 Miliar Menurut pernyataan dari Wakil Walikota Batu, Punjul Santosobahwasanya serapan anggaran yang masih senilai 52,93% ini berasal dari pekerjaan fisik yang sifatnya masih belum terbayarkan.
- c. Pengerjaan fisik ini seperti pada pembangunan relokasi kios permanen yang digunakan untuk para pedagang pasar besar Kota Batu yang berlokasi di Stadion Brantas dengan biaya Rp. 4,6 Miliar
- d. Selain itu terdapat pembangunan jembatan Sisir-Pandanrejo serta pelebaran jembatan di daerah Temas-Pandanrejo senilai Rp 500 juta, pembangunan Perpustakaan Kota Batu senilai Rp 1,9 Miliar, pembangunan rumah kemas dengan nilai Rp. 1,3 Miliar dan lain-lain.
- e. Dikarenakan terdapat adanya pembangunan fisik yang tengah berlangsung, maka harapan dari wakil walikota ini agar dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun 2021 yang dapat menekan jumlah SILPA 2021 yang akan lebih rendah dari SILPA 2020

yang senilai Rp. 261 Miliar.

2. Dengan adanya permasalahan ini,, pemerintah Kota Batu sebagai aparatur negara mencari cara untuk memberikan solusi terkait masalah pengelolaan APBD tentang penyerapan anggaran yang masih belum maksimal sesuai target yang diperkirakan sebelumnya yakni hanya separuh dari jumlah anggaran. Serapan anggaran yang hanya 52,43% ini berasal dari banyak pekerjaan yang masih belum terbayarkan, terutama pada fisik bangunan yang belum selesai serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diperkirakan akan dapat maksimal dengan bantuan SKPD Kota Batu dengan menyelesaikan program-programnya dengan target 90% hingga akhir tahun 2021.
3. Bukan hanya Kota Batu saja, tetapi seluruh Kabupaten dan Kota di Malang Raya untuk penyerapan APBD Tahun 2021 dinilai masih rendah dan juga dianggap tidak maksimal untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga pada bulan Oktober 2021 menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan untuk tingkat penyerapan anggaran untuk Kabupaten Malang hanya senilai 62,15%, Kota Malang senilai 49,40% dan yang terakhir Kota Batu yang mencapai 52,43%.¹

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari Kota Batu yang menjadi daerah Kota Otonom dengan memperhatikan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu

¹ Akhir Tahun Serapan Anggaran Pemerintah Kota Batu dalam <https://batuhits.com/4101-akhir-tahun-serapan-anggaran-pemerintah-kota-batu-masih-5243-persen?amp> diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 16.05 WIB

yang memiliki kewajiban untuk dapat mengelola aset dan juga anggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, memperhatikan pada ketentuan terkait pengelolaan anggaran juga menjadi suatu elemen penting pada penilaian *good governance* yang dalam ini akuntabilitas dan transparansi di dalam menangani tata kelola keuangan dan aset daerah.

- a. Menurut pernyataan dari Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso bahwa serapan anggaran yang masih senilai 52,93% ini berasal dari pekerjaan fisik yang sifatnya masih belum terbayarkan.
 - b. Pekerjaan fisik ini seperti pada pembangunan relokasi kios permanen yang digunakan untuk para pedagang pasar besar Kota Batu yang berlokasi di Stadion Brantas dengan biaya Rp. 4,6 Miliar
 - c. Selain itu terdapat pembangunan jembatan Sisir-Pandanrejo serta pelebaran jembatan di daerah Temas-Pandanrejo senilai Rp 500 juta, pembangunan Perpustakaan Kota Batu senilai Rp 1,9 Miliar, pembangunan rumah kemas dengan nilai Rp. 1,3 Miliar dan lain-lain.
 - d. Dikarenakan terdapat adanya pembangunan fisik yang tengah berlangsung, maka harapan dari wakil walikota ini agar dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun 2021 yang dapat menekan jumlah SILPA 2021 yang akan lebih rendah dari SILPA 2020 yang senilai Rp. 261 Miliar.
4. Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah Kota Batu sebagai aparatur negara mencari cara untuk memberikan solusi terkait masalah pengelolaan APBD tentang penyerapan anggaran yang masih belum maksimal sesuai target yang diperkirakan sebelumnya yakni hanya separuh dari jumlah anggaran.

Serapan anggaran yang hanya 52,43% ini berasal dari banyak pekerja yang masih belum terbayarkan, terutama pada fisik bangunan yang belum selesai serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diperkirakan akan dapat maksimal dengan bantuan SKPD Kota Batu dengan menyelesaikan program-programnya dengan target 90% hingga akhir tahun 2021.

5. Bukan hanya Kota Batu saja, tetapi seluruh Kabupaten dan Kota di Malang Raya untuk penyerapan APBD Tahun 2021 dinilai masih rendah dan juga dianggap tidak maksimal untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga pada bulan Oktober 2021 menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan untuk tingkat penyerapan anggaran untuk Kabupaten Malang hanya senilai 62,15%, Kota Malang senilai 49,40% dan yang terakhir Kota Batu yang mencapai 52,43%.²

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari Kota Batu yang menjadi daerah Kota Otonom dengan memperhatikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu yang memiliki kewajiban untuk dapat mengelola aset dan juga anggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

² Penyerapan APBD Malang Raya Rendah, Tak Maksimal Dorong Pertumbuhan dalam website <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20211202/532/1473002/penyerapan-apbd-malang-raya-rendah-tak-maksimal-dorong-pertumbuhan> diakses pada tanggal 10 Februari 2022

Di samping itu, memperhatikan pada ketentuan terkait pengelolaan anggaran juga menjadi suatu elemen penting pada penilaian *good governance* yang dalam ini akuntabilitas dan transparansi di dalam menangani tata kelola keuangan dan aset daerah. Dalam hal ini berhubungan fungsi dari APBD sendiri yakni sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tingkatan daerah pada tahun anggaran berikutnya serta untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah yang kemudian berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini. Dari latar belakang masalah di atas penulis membuat judul penelitian ini yaitu **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dipecahkan oleh penulis pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas BPKAD Kota Batu terhadap tatakelola keuangan selama pandemi covid-19?
2. Bagaimana pengaruh transparansi keuangan terhadap tata Kelolakeuangan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu?
3. Bagaimana pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap tata Kelola keuangan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu?
4. Apa faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan anggaranAPBD yang dilakukan oleh BPKAD?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dan latar belakang yang akan dibahas dan dipecahkan, maka pada tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas BKAD Kota Batu terhadap tata kelolakeuangan selama pandemi covid-19.
2. Pengaruh transparansi keuangan terhadap tata Kelola keuangan yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu..
3. Pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap tata Kelolakeuangan yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu.
4. Faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan anggaran APBD yang dilakukan oleh BKAD.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pada penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Batu, Jawa Timur. Adapun beberapa manfaat yang dapat peneliti kontribusikan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi sebuah gambaran tentang kondisi dan situasi mengenai tindakan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD oleh BPKAD Kota Batu. Bagi Pemerintah Kota Batu sebagai bahan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran APBD selama pandemi covid-19.

b. Untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dilakukan kedepannya dapat memberikan bentuk pandangan pada civitas akademika Universitas Islam Malang yang akan melakukan penelitian di masa depan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh BPKAD Kota Batu pada masa pandemi covid-19.

c. Untuk masyarakat Kota Batu

Penelitian ini penulis harapkan untuk dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat desa tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh BPKAD Kota Batu pada masa pandemi covid-19 sehingga masyarakat Kota Batu dapat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pelaksanaan anggaran ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

1.5 Urgensi Penelitian

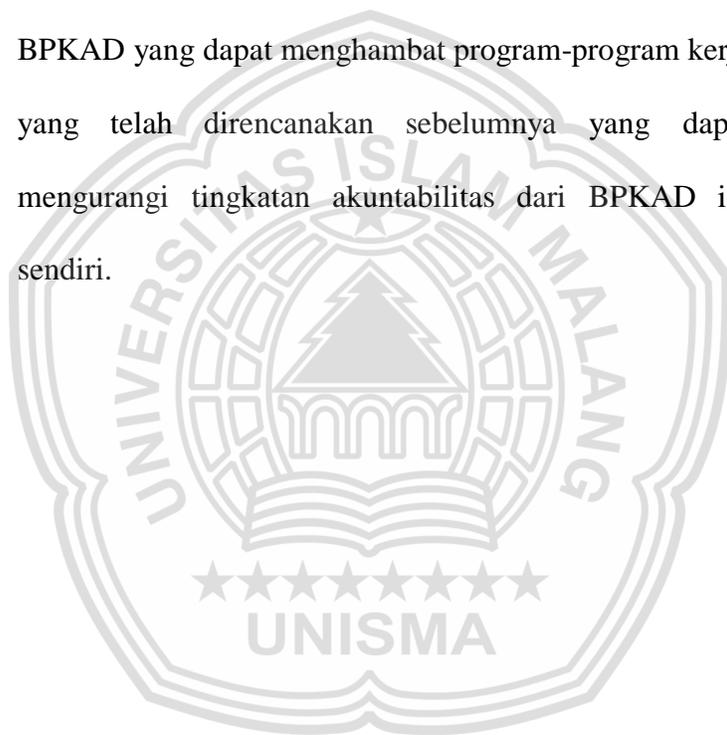
Urgensi (kepentingan) dari penelitian ini yakni untuk mengetahui beberapa poin yakni sebagai berikut :

1. a) Akuntabilitas dari BPKAD menjadi poin penting untuk dapat diketahui masyarakat akan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai pengelola anggaran dan aset daerah di wilayah Kota Batu.
b) Pengelolaan anggaran dalam hal ini anggaran yang berasal dari APBD kemudian digunakan untuk kepentingan keuangan daerah untuk seluruh dinas dan badan terkait yang ada di Kota Batu untuk melaksanakan program-program kerjanya.
2. a) Transparansi anggaran yang menjadi tantangan bagi BPKAD Kota Batu untuk memberikan informasi mengenai anggaran yang keluar dan masuk, sisa anggaran dan penggunaan sisa anggaran tersebut yang digunakan untuk kepentingan apa dan sebagainya melalui website resmi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Batu
b) Profesionalisme dari BPKAD Kota Batu yang harus diketahui ketika melakukan pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD untuk keperluan program-program

kerja dari dinas tersebut selama pandemi covid-19 di Kota Batu

3. a) Faktor pendorong pada pengelolaan anggaran oleh BPKAD yang dinilai faktor yang penting demi keberhasilan tanggung jawab/akuntabilitas penganggaran pada BPKAD terkait program kerjanya.

b) Faktor penghambat pada pengelolaan anggaran pada BPKAD yang dapat menghambat program-program kerja yang telah direncanakan sebelumnya yang dapat mengurangi tingkatan akuntabilitas dari BPKAD itu sendiri.



B

A

B

V

P

E

N

U

T

U

P

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketika diuji dengan uji *Kolmogorov Smirnov* pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* tidak berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat tidak berpengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dengan tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H1) dan tidak dapat diterima atau tidak valid.
2. Pengaruh transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov*

Smirnov berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara transparansi (X2) dengan Tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H2) dan dapat diterima.

3. Kemudian ketika diuji dengan uji heterokedastisitas menggunakan metode scatterplots tiga variabel dengan menambah satu variabel tambahan dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) tidak mengalami gejala heterokedastisitas pada model dari regresi penelitian ini yang dapat dinilai positif. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) pada tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 3 (H3) dapat diterima.
4. Tidak adanya pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola anggaran dikarenakan uji Kolmogorov bersifat valid dan dapat diterima, tetapi ketika diuji dengan uji heterokedastisitas akuntabilitas menjadi valid dan diterima. Hal ini ketika ditambah satu variabel tambahan terdapat pengaruh yang signifikan, valid dan dapat diterima dengan alasan adanya pengaruh dari tambahan satu variabel tersebut yang dapat mempengaruhi hasil dari uji heterokedastisitas yang menggunakan tiga variabel.

5.2 Saran

1. Dengan melatarbelakangi serapan anggaran yang hanya 52,43% ini berasal dari banyak pekerjaan yang masih belum terbayarkan, terutama pada fisik

bangunan yang belum selesai serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diperkirakan akan dapat maksimal dengan bantuan SKPD Kota Batu dengan menyelesaikan program-programnya dengan target 90% hinggaakhir tahun 2021. Variabel yang ditolak pada variabel akuntabilitas maka terdapat beberapa problem solving, yakni selanjutnya dapat memberikan beberapa penyelesaian masalah (problem solving) yakni melakukan suatu bentuk reformasi pada penyajian laporan keuangan yakni Pemerintah Kota Batu dapat menyediakan seluruh informasi keuangan dengan relevan dengan jujur serta terbuka pada public.

Hal ini dikarenakan kegiatan daerah pemerintah yakni dalam melaksanakan amanat dari rakyat untuk dapat mengelola keuangan daerah. Sebuah penyajian laporan keuangan yang lengkap serta langsung tersedia serta adanya aksesibilitas untuk pengguna informasi. Selain itu melakukan peningkatan pada nilai komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan hingga capaian kinerja yang dapat menunjukkan tingkat efektivitas dari akuntabilitas keuangan serta efisiensi penggunaan pada anggaran yang baik.

2. Agar anggaran dapat terserap dengan maksimal yakni dengan adanya sinergi yang dibentuk oleh Aparatur Penegak Hukum serta Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang kemudian dapat diwujudkan. Dengan adanya sinergi tersebut akan memberikan keyakinan yang lebih besar pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dapat

melaksanakan program-program pembangunan tanpa khawatir untuk berhadapan dengan persoalan hukum di masa depan.

APIP kemudian akan bersinergi dengan aparaturnya penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Ketiga komponen ini kemudian akan memberikan pendampingan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Kota Batu serta para kuasa atas penggunaan anggaran sehingga seluruh SKPD tidak merasa takut hingga serapan anggarannya menjadi tidak maksimal.

Selanjutnya untuk dapat mensinergikan tugas dari APIP, Kepolisian, Kejaksaan serta BPK untuk melakukan optimalisasi target serta monitoring untuk realisasi anggaran, serapan anggaran APBD Tahun 2020/2021 yang harus dilakukan dengan berbagai langkah serta kebijakan hukum. Termasuk pembangunan tata kelola pemerintah yang bersifat efektif, efisien serta taat hukum.

3. Faktor penghambat dari pengelolaan anggaran APBD yang dilakukan oleh BKAD sebaiknya untuk server pusat yang ada di Kemendagri agar segera diperbaiki dan server segera di distribusikan ke masing-masing daerah di Indonesia.

R PUSTAKA**DAFTA**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan RepublikIndonesia.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. *Pengintegrasian Akuntabilitas Kinerja pada Proses Perencanaan dan Penganggaran – Upaya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten (Buku 2)*.

• Jurnal/Artikel

Arwani, Ahmad. 2015. “*Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)*.” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Brawijaya 2015

Auditya. Husaini, Lismawati. 2013. “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013:21-42 Program Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013:21-42 Program Magister Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

Basri, Gusnardi. 2021. “*Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*.” Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Program Studi S1 Akuntansi Universitas Riau

Ireeuw, Stevani. 2019. “*Pengaruh Pengeolaan Keuangan Daerah danSistem Akuntansi Keuangan Daerah Tehadap Kinerja Pemerintah*.”Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Volume 14, Nomor 1, Mei 2019:87-99. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. “*Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*”. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Volume 2 Nomor 3, 2018 Hal 149-162.

Nuhung, Ari Ekawaty. 2021. “*Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat*”. Tesis Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014. *“Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang”*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 2 – November 2014. Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur.

Putra, Gerryan. 2017. *“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”*. Artikel Program Studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau

South, Tinangon, Rondonuwu. 2016. *“Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”*. Jurnal Emba Vol. 4 No.1 Maret 2016 Hal 613-622 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Sriwijayanti, Hari. 2018. *“Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang)”*. Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 7, No.1, April 2018, Hal 88 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia.

Wahyuniar. 2017. *“Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai”*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

• **Internet/Website**

Akhir Tahun Serapan Anggaran Pemerintah Kota Batu dalam <https://batuhits.com/4101-akhir-tahun-serapan-anggaran-pemerintah-kota-batu-masih-5243-persen?amp> diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 16.05 WIB

Amisepti, Anisa. 2017. Peran SKPD dalam Menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel dalam website <https://monitor.co.id/2017/06/01/peran-skpd-dalam-menghasilkan-laporan-keuangan-daerah-yang-kredibel-dan-akuntabel/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 15.06 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.

2019. Dalam website <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan> diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 14.05 WIB

Data Anggaran dan Realisasi APBD dalam Penanganan Covid-19 SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 23.05 WIB

Data Anggaran dan Realisasi APBD dalam Penanganan Covid-19 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Batu dalam website resmi PPID Kota Batu Tahun Anggaran 2020 pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 12.03 WIB

Data Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 00.01 WIB

Data Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 23.07 WIB

Herman et al (2014)

Humas Kota Batu. 2020. Dalam website <https://humas.batukota.go.id/2020/06.30> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 18.09 WIB

Mardiasmo, 2006

Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019. 2020. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal

23 Januari 2022 pukul 07.01 WIB

Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019. 2020. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 18.47 WIB

Peraturan Walikota Batu Nomor 440/160/422.031/2021. 2021. Tentang Surat Edaran Walikota Batu Nomor 440/160/422.031/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Batu. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.04 WIB

Yusron Sumartono, SE. 2017. Struktur Pengelola Keuangan Daerah – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dalam website <https://ap.surabaya.go.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 13.04 WIB

